

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

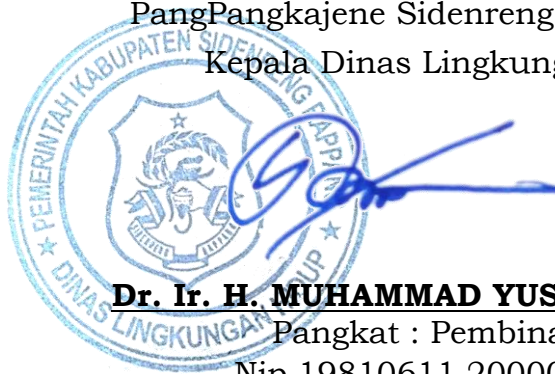
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis periode 2025 – 2029 umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Rencana Kerja tahun 2026 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada Renja periode 2025 juga direncanakan program kegiatan berkesinambungan sesuai yang dirumuskan pada RENSTRA 2025-2029

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, dan Indikator beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikator, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 disusun sebagai dokumen Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 serta digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja.

Pangkajene Sidenreng, 19 Juli 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip 19810611 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 01

 I.1 LATAR BELAKANG 01

 I.2 LANDASAN HUKUM 02

 I.3 MAKSUD DAN TUJUAN 04

 I.4 SISTEMATIKA PENULISAN 04

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN 07

 II.1 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
 TAHUN 202407

 II.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
 DAERAH 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 13

 III.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 13

BAB IV PENUTUP 19

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dokumen perencanaan yang mempedomani Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 yaitu **“Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan”** dengan Prioritas Pembangunan Daerah : (1) Peningkatan Produktifitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis Unggulan; (2) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan; (3) Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas; (4) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana; (5) Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius; (6) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan; (7) Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas. Renja Perangkat daerah memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja. Penyusunan Renja dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 dimulai dengan penyusunan rancangan awal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dimulai paling lambat minggu pertama bulan desember. Selanjutnya untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju dalam rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.

Selanjutnya penyusunan rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 juga memperhatikan perkembangan regulasi perencanaan terbaru, yaitu regulasi turunan atas Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 juga disusun dengan berpedoman dengan regulasi dimaksud.

Rancangan awal Renja akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi bahan untuk pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Setelah disempurnakan dengan hasil forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, maka rancangan awal Renja Perangkat Daerah akan memasuki tahapan perencanaan selanjutnya yaitu menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 TENTANG Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7080);
 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pasal 147;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 91);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);

22. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2026 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS)
- 2) Mendeskrosikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
- 3) Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

2. **Bab II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026**

2.1 Hasil Capaian Program/Kegiatan sampai Triwulan II Tahun berjalan berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang meme
4. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
5. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
6. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.2 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan Uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

3. **Bab III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

4. **Bab IV : Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut

BAB II.

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terdiri :

1. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 2 Dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan anggaran Rp. 7.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.210.800,- atau 46%.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target 2 Dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan anggaran Rp. 2.805.000,- dengan realisasi Rp. 965.000,- atau 34%.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan target 2 Dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan anggaran Rp. 3.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.220.000,- atau 41%.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 2 Dokumen dan

realisasi 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 5.043.500,- dengan realisasi Rp. 2.516.100,- atau 50%.

- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 2 Laporan dan realisasi 1 Laporan dengan anggaran Rp. 1.500.000,- dengan realisasi Rp. 729.000,- atau 49%.
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 Dokumen dan realisasi 6 Dokumen dengan anggaran Rp. 1.500.000,- dengan realisasi Rp. 1.167.000,- atau 78%.
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 1.500.000,- dengan realisasi Rp. 1.500.000,- atau 100%.
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.258.000,- atau 45%.
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan target 1 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen dengan anggaran Rp. 1.500.000,- dengan realisasi Rp. 1.248.000,- atau 83%.

- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan target 12 Dokumen dan realisasi 6 Dokumen dengan anggaran Rp. 8.011.000,- dengan realisasi Rp. 4.425.000,- atau 55%.
- 11) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi Dokumen dengan anggaran Rp. 8.011.000,- dengan realisasi Rp. 4.425.000,- atau 55%.
- 12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi Dokumen dengan anggaran Rp. 2.500.000,- dengan realisasi Rp. 2.004.000,- atau 80%.
- 13) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan sub Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target 65 Paket dan **25 realisasi** Dokumen dengan anggaran Rp. 2.880.000,- dengan realisasi Rp. 955.000,- atau 33%.
- 14) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 180 Dokumen dan realisasi 70 Dokumen dengan anggaran Rp. 135.731.500,- dengan realisasi Rp. 100.324.036,- atau 74%.

- 15) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan target 9 Unit dan realisasi 5 Unit dengan anggaran Rp. 51.888.150,- dengan realisasi Rp. 29.748.000,- atau 57%.
- 16) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan target 500 Dokumen dan realisasi 200 Dokumen dengan anggaran Rp. 2.004.000,- dengan realisasi Rp. 1.000.000,- atau 50%.
- 17) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 Dokumen dan realisasi 6 Dokumen dengan anggaran Rp. 55.000.000,- dengan realisasi Rp. 38.242.742,- atau 70%.
- 18) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 12 Dokumen dan realisasi 6 Dokumen dengan anggaran Rp. 545.522.000,- dengan realisasi Rp. 337.833.132,- atau 62%.
- 19) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan target 1 Unit dan 0 realisasi dengan anggaran Rp. 31.280.000,- dengan realisasi Rp. 19.317.200,- atau 62%.

- 20) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target 75 Unit dan realisasi 40 Unit dengan anggaran Rp. 125.906.000,- dengan realisasi Rp. 40.830.250,- atau 32%.
- 21) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan target 4 Unit dan 2 realisasi dengan anggaran Rp. 10.250.000,- dengan realisasi Rp.2.684.000,- atau 26%.
- 22) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 1 unit dan 0 realisasi dengan anggaran Rp. 23.000.000,- dengan realisasi Rp. 9.972.500,- atau 43%.
- 23) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan target 2 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen dengan anggaran Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.000.000,- atau 10%.

- 24) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air udara dan laut dengan target 1 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen dengan anggaran Rp. 9.080.000,- dengan realisasi Rp. 784.000,- atau 9%.
- 25) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan dengan target 2 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen dengan anggaran Rp. 9.080.000,- dengan realisasi Rp. 784.000,- atau 9%.
- 26) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan target 12 Laporan dan 5 realisasi dengan anggaran Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.096.000,- atau 31%.
- 27) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan target 12 Tiik dan realisasi 7 Titik dengan anggaran Rp. 10.920.400,- dengan realisasi Rp. 5.819.900,- atau 53%.

- 28) Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan sub Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan target 50 Ha dengan realisasi 25 Ha dengan anggaran Rp. 1.707.960.500,- dengan realisasi Rp. 879.434.000,- atau 51%.
- 29) Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) kegiatan Penyimpanan sementara limbah B3 dengan sub Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 dengan target 6 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen dengan anggaran Rp. 12.320.000,- dengan realisasi Rp. 3.733.496,- atau 30%.
- 30) Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) kegiatan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan sub koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan target 6 Dokumen dengan realisasi 2 Dokumen dengan anggaran Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.664.800,- atau 37%.
- 31) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sub Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dan target 7 Dokumen dengan realisasi 3 Dokumen dengan anggaran Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp. 5.361.000,- atau 54%.

- 32) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sub Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Target 35 Badan Usaha dan realisasi 10 Badan Usaha dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dengan realisasi Rp. 5.108.500,- atau 34%.
- 33) Program Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH dengan kegiatan Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan sub Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan target 1 Dokumen dan realisasi dengan anggaran Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.412.000,- atau 14%.
- 34) Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota dengan sub Penilaian kinerja masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia Pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup target 8 Entitas realisasi 0 Entitas dengan anggaran Rp. 32.459.000,- dengan realisasi Rp. 5.873.477,- atau 18%.

- 35) Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota dengan sub Pengelolaan pengaduan masyarakat target 10 Pengaduan dan realisasi 8 Pengaduan dengan anggaran Rp. 13.730.000,- dengan realisasi Rp5.114.500,- atau 37%.
- 36) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub Penyediaan saran dan prasaran pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota target 2 Unit dan 0 realisasi dengan anggaran Rp. 100.000.000,- dengan realisasi Rp 0,- atau 0%.
- 37) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub Penyusunan rencana, kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota target 2 Dokumen dan realisasi 0 Dokumen dengan anggaran Rp. 20.000.000,- dengan realisasi Rp 0,- atau 0%.
- 38) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub Penanganan sampah melalui pengangkutan target 27.021.25 Ton dan realisasi 675.531,25 Ton dengan anggaran Rp. 3.926.444.600,- dengan realisasi Rp 1.997.135.077,- atau 51%.
- 39) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah target 88 Persentase dan realisasi 22 Persentase dengan anggaran Rp. 5.250.000,- dengan realisasi Rp 1.800.000,- atau 34%.

- 40) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah dan instansi pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, ban sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan target 9.260.03 Ton dan realisasi 231.500,75 Ton dengan anggaran Rp. 1.972.187.300,- dengan realisasi Rp1.043.756.520,- atau 53%.
- 41) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan Kembali target 7 Laporan dan realisasi 4 Laporan dengan anggaran Rp. 4.740.000,- dengan realisasi Rp 0,- atau 0%.
- 42) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan sub Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir target 38.500 Ton dan realisasi 9625 Ton dengan anggaran Rp. 840.115.200,- dengan realisasi Rp 342.516.000,- atau 41%.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu:

Adapun realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dirancakan sampai triwulan II belum ada.

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan anggaran Rp. 1.500.000,- dengan realisasi Rp. 1.448.640,- atau 97%.

- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan anggaran Rp. 1.500.000,- dengan realisasi Rp. 1.017.000,- atau 68%.
- 3) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 1.500.000,- dengan realisasi Rp. 1.500.000,- atau 100%.
- 4) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 1.500.000,- dengan realisasi Rp. 1.004.000,- atau 67%.
- 5) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target 1 Unit dan realisasi 1 Unit dengan anggaran Rp. 23.000.000,- dengan realisasi Rp. 9.972.500,- atau 43%.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II belum ada.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:

- 1) Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatanannya.
- 2) Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
- 3) Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
- 4) Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

5. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 yaitu :

- a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
- b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu:

- Penyusunan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus berorientasi langsung kepada pencapaian target berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan.
- Kegiatan yang bersifat pembinaan memerlukan dukungan biaya operasional yang memadai guna memaksimalkan kinerja di lapangan.
- Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani program kerja.

- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan, khususnya dalam hal pelimpahan kegiatan di tingkat kabupaten/kota.
- Kerja sama dengan *stakeholder* serta sesama Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar ketidaksesuaian data dan informasi perencanaan dapat diminimalkan

Adapun pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

Tabel II.1.													
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2026 (Tahun Berjalan)													
Kabupaten Sidenreng Rappang													
Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup													
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja capaian program (Renstra Pertangkat Daerah) s/d Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2026			Perkiraan Realisasi Capaian Targer Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasii Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=9/4*100)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN I								
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100	50	50	150	100
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan yang di hasilkan	100	14	15	10	66.6	100	100
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	4	2	4	2	8	88.8

2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1	1	1	1	2	66.6
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	2	2	1	0,5	3	50
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	1	1	1	1	2	66.6
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	2	2	0	0	2	33.3
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15	4	5	2	0,4	6	40
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	2	1	0,5	1	1

2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Administrasi Keuangan	100	100	589	573	0.97	673	100
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2240	560	560	560	1	1120	50
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	48	0	12	6	0,5	6	12,5
2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	0	1	1	1	1	25
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	1	0	0	1	25
2	11	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	0	1	0	0	0	0
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	12	12	6	0,5	18	37,5

2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		8	0	2	1	0,5	1	25
2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	0	1	1	1	1	25
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	0	1	0	0	0	0
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	955	145	0.15	245	100
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	292	6	70	20	0.28	26	8.9
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar Daerah	559	780	780	125	0.16	905	161
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		100	100	100	20	0,2	120	100
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	4	0	1	10	10	10	250
2	11	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	4	0	0	1	0	1	25

2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	0	0	1	0	1	2,5
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan ¹	16	19	4	1	0,25	20	125
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan ¹	4	19	19	4	0.21	23	575
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		100	100	100	35	0,35	135	100
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500	133	500	163	0,326	296	11,84
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	9	12	6	0,5	15	25
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	6	0,5	18	30
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	129	68	0.55	168	100
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	1	1	0	0	1	20

2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	231	23	75	40	0.65	63	16.45
2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	0	0	30	12	0,4	12	740
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan alat dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	22	22	15	0.68	37	740
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	5	1	1	1	1	2	40
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	100	100	0	0	100	100
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH	100	100	0	0	0	100	100
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	2	1	0	0	0	1	50

2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan KLHS	100	100%	2	0	0	1	40
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	10	0	0	0	0	0	0
2	11	03	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	5	2	2	0	0	2	40
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkugan Hidup	100	40	100	2	2	42	100
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	8	2	25	100	100
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10	2	2	0	0	2	20

					Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan Informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10	0	2	0	0	0	0
					Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan yang dilaksanakan	10	0	2	1	0,5	1	10
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	10	2	2	1	0,5	3	30
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100	100	100	0	0	100	100
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	77	11	12	5	0.41	16	20.77
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	77	17	12	6	0,5	23	29.8

2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	20	18	18,19	0,32	1,76	18,32	100
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	100	100	0,32	0,32	100	100
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hiaju (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	271	1	50	25	0,5	26	9.59
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	0	0	0	0	0	0
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	100	100	30	49	100	100	100
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	100	100	0,25	25	100	100	100
2	11	05	2.01	01	Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilakukan	37	4	4	2	0,5	6	16.21

2	11	05	2.01		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah	100	100	100	24	24	100	100
2	11	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	15	4	4	2	0,5	6	40
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100	100	30	30	100	100
	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin	100	100	100	30	30	100	100
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	35	7	7	4	0.57	11	31

2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175	25	25	10	0,4	35	20
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100	100	100	45	45	100	100
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100	100	100	45	45	100	100
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5	5	1	0	0	5	100

2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100	200	100
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup	100	100	100	0	0	100	100
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	42	5	5	0	0	26	66.6
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	48	48	148	100
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	100	48	48	148	100
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	50	7	10	6	0,6	13	26

2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota	100	70	73	45	61,64	100	100
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100	100	72	45	62,5	100	100
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2	0	0	1	1	1	50
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	5	2	0	0	5	250
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana Kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	2	4	4	2	0,5	6	300
2	11	11	2.01	0012	Penanganan Sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2702125	22000	22.000	675,00	30.7	22675	0.83
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	88	0	88	22	0,25	22	25

2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai denagn peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai denagn peraturan perundangan	926003	0	0	0,00	0,00	0	0
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	7	10000	10.000	0	0	10000	14285
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah meallui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	38500	0	9260.03	2315	0	2315	6.12

II.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

Tingkat Kinerja Pelayanan

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH):** Menunjukkan tren capaian yang secara rata-rata memenuhi kriteria tinggi, meski ada fluktuasi pada komponen air, udara, dan kualitas lahan.
- **Pengelolaan Sampah:** Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, didukung operasional UPTD TPA dan program pengembangan kinerja persampahan.
- **Ruang Terbuka Hijau (RTH):** Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati menghadapi tantangan penyesuaian target dan realisasi di lapangan.

Hal Kritis dan Permasalahan Pelayanan

- **Akuntabilitas Pengangkutan Sampah:** Layanan pengangkutan sampah (seperti di fasilitas publik atau Pasar Sentral Rappang) belum sepenuhnya maksimal akibat kendala teknis operasional dan faktor budaya serta kesadaran masyarakat.
- **Budaya Organisasi dan Perilaku Masyarakat:** Faktor dominan yang menghambat kebersihan lingkungan dan efektivitas layanan persampahan berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran warga dalam mengelola sampah dari sumbernya.
- **Keterbatasan Sarana dan Prasarana:** Fasilitas pendukung pengolahan limbah, armada pengangkut sampah, serta pemenuhan proporsi RTH masih memerlukan optimalisasi anggaran dan daya dukung infrastruktur.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Permasalahan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- **Volume Sampah Meningkat:** Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi memicu lonjakan volume sampah harian.
- **Persampahan di Kawasan Publik:** Penanganan sampah di area publik dan pasar tradisional masih menjadi titik berat yang belum optimal.
- **Potensi Pencemaran Lingkungan:** Tantangan pengawasan limbah dan aktivitas penambangan atau penggilingan padi yang berisiko mencemari badan air dan lingkungan.

Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

- **Sarana dan Prasarana Kurang Memadai:** Keterbatasan armada truk pengangkut sampah serta kondisi kendaraan yang sering mengalami gangguan operasional.
 - **Fasilitas Pengolahan Belum Modern:** Sistem pembuangan akhir yang masih memerlukan peralihan dari pola terbuka (*open dumping*) menuju sistem pengolahan yang lebih higienis.
 - **Rendahnya Kesadaran Masyarakat:** Kurangnya partisipasi warga dalam membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan saluran drainase.
 - **Keterbatasan Sumber Daya:** Kapasitas personel lapangan serta dukungan anggaran yang belum sebanding dengan luasnya cakupan wilayah kerja.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);

Dampak terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

- **Pengelolaan SDA Berkelanjutan:** Mendukung misi daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem di Kab. Sidrap.
- **Pengendalian Kerusakan:** Menurunkan tingkat pencemaran air, udara, dan tanah melalui pengawasan ketat terhadap kegiatan usaha/industri.
- **Estetika & Kenyamanan Wilayah:** Penataan ruang terbuka hijau (RTH) dan kebersihan kawasan publik (seperti pasukan biru penanganan sampah) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dampak terhadap NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)

- **Kepatuhan Regulasi:** Menjadi turunan teknis aturan pusat dalam perizinan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan pengawasan ketaatan perusahaan.
- **Standarisasi Pengelolaan:** Memastikan operasional pengelolaan limbah B3 dan persampahan sesuai prosedur nasional

Dampak terhadap SDGs (*Sustainable Development Goals*)

- Pengendalian pencemaran badan air dan sungai agar kualitas air baku tetap terjaga.
- Pengelolaan sampah terpadu dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
- Aksi nyata mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari sampah dan gerakan penghijauan

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

Tantangan Pelayanan Perangkat Daerah

- **Volume Sampah Tinggi:** Tumpukan limbah di pusat aktivitas seperti Pasar Sentral Rappang menuntut kesiapan armada dan personel secara terus-menerus.
- **Kesadaran Publik:** Sebagian warga masih membuang sampah tidak pada tempatnya, termasuk ke dalam drainase dan saluran irigasi.
- **Keterbatasan Infrastruktur:** Sarana penunjang teknis pengelolaan sampah dan limbah B3 masih memerlukan peningkatan kapasitas dan pemeliharaan rutin.

Peluang Peningkatan Pelayanan

- **Kolaborasi Lintas Sektor:** Program Gerakan Sidrap Bersih membuka ruang kerja sama kuat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga tingkat kelurahan.
 - **Ekonomi Sirkular UMKM:** Pelibatan pelaku usaha lokal untuk mengolah limbah plastik memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mengurangi pencemaran.
 - **Dukungan Kebijakan Pimpinan:** Komitmen kepala daerah memperkuat koordinasi bersama perangkat daerah mempercepat eksekusi program kebersihan dan lingkungan.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Formulasi isu-isu penting Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) berfokus pada peningkatan layanan persampahan, pengendalian pencemaran air dan udara, serta penguatan tata kelola dokumen lingkungan hidup guna mendukung target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Isu Strategis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

- **Peningkatan Kapasitas TPA:** Perluasan dan optimalisasi sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah agar memenuhi standar teknis sanitasi.
- **Pengurangan Sampah dari Sumbernya:** Penguatan program bank sampah serta edukasi pemilahan sampah rumah tangga di tingkat kecamatan dan desa.
- **Optimalisasi Sarana Angkut:** Penambahan dan peremajaan armada truk pengangkut sampah untuk memperluas cakupan wilayah layanan perkotaan dan perdesaan.

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- **Pengawasan Limbah Usaha/Industri:** Peningkatan frekuensi pengawasan izin lingkungan dan uji sampel air limbah pada kegiatan agroindustri serta peternakan.
- **Konservasi Sumber Daya Air:** Mitigasi pencemaran pada daerah aliran sungai (DAS) dan danau melalui aksi bersih lingkungan serta penanaman pohon pelindung.
- **Pemantauan Kualitas Udara dan Air:** Penyediaan data berkala terkait indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan di Kabupaten Sidrap.

Catatan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

- **Digitalisasi Pelaporan Kinerja:** Integrasi data lingkungan dan pelaporan kegiatan berbasis elektronik yang selaras dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- **Penguatan Regulasi Lokal:** Sinkronisasi kebijakan daerah dengan perundangan-undangan terbaru terkait pengelolaan sampah dan perlindungan ekosistem.
- **Kolaborasi Lintas Sektor:** Peningkatan sinergi antara DLH, pihak kecamatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat peduli lingkungan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan dilapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas. Jumlah program dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 sebanyak 10 (sepuluh) program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub. Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp **13.579.139.000** Sumber Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 adalah :

a. Program

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - b) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - b) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - c) Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
 - d) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup

- 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - b) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - b) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a) Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 2) Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

- 1) Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - a) Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

j. Program Pengelolaan Persampahan

- 1) Pengelolaan Sampah
 - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - b) Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - c) Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
 - d) Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah

- e) Penanganan Sampah Melalui Pemilahan danm Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
- f) Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah
- g) Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST Kabupaten Kota Atau TPA/TPA Regional.

Tabel III.1.														
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026														
Kabupaten Sidenreng Rappang														
Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang														
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2026							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersiadaan pelayanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5.000.685.425		100%	4.821.761.000		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan yang di hasilkan		100%	35.200.000		100%	22.348.500		ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	12.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	7.000.000	

2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.500.000	
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.805.000	
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.700.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.500.000	
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	4.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	3.000.000	
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	11.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	5.043.500	

2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	3.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	1.500.000	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Administrasi Keuangan		100%	3.964.975.425	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	3.813.450.850	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang, Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan Batu Lappa	560 Orang/Bulan	3.941.775.425	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	504 Orang/Bulan	3.795.939.850	
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan Batu Lappa	12 Dokumen	1.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Sidenreng Rappang, Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan Batu Lappa	12 Dokumen	1.500.000	
2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.500.000	
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	7.700.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5.000.000	
2	11	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Sidenreng Rappang, Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan Batu Lappa	1 Dokumen	2.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Sidenreng Rappang, Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan Batu Lappa		1.500.000	

2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	10.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	8.011.000	
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	4.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	203.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	138.611.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Paket	3.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	2.880.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar Daerah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185 Laporan	200.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	135.731.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup

2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	10.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	8.011.000	
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	4.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	203.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	138.611.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Paket	3.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	2.880.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar Daerah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185 Laporan	200.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	135.731.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup

2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	454.040.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	602.526.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Laporan	5.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Laporan	2.004.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	74.040.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	55.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	375.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	545.522.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup

2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	293.970.000			100%	190.436.000	
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	40.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	31.280.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Unit	133.970.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Unit	125.906.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit	5.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit	0	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan alat dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76	15.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78	10.250.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	100.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	23.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup

2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		100%	178.758.000	Masyarakat		100%	0	Masyarakat
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH		100%	168.758.000			100 Persen	0	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	168.758.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan KLHS		100%	10.000.000			100 Persen	0	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	
2	11	03	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	5.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	0	

2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		60%	100.000.000			60%	61.100.400	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		100%	75.000.000			100%	40.180.000	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	25.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	10.000.000	
					Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan Informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Lokasi	15.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Lokasi	9.080.000	
					Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan yang dilaksanakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	21.100.000	
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan,	2 Dokumen	15.000.000			2 Dokumen	0	

2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		100%	25.000.000			100%	20.920.400	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	10.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	10.000.000	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Titik	15.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Titik	10.920.400	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan		20%	1.780.000.000			20%	1.724.031.500	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		100%	1.780.000.000			100%	1.724.031.500	
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Ha	1.750.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Ha	1.707.960.500	

					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	30.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	16.071.000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 Persen	43.000.000			88 Persen	22.320.000	
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Usaha yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20.000.000			100%	12.320.000	
2	11	05	2.01	01	Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilakukan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Usaha	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Usaha	12.320.000	
2	11	05	2.01		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah		100%	23.000.000	Usaha/Kegiatan		100%	10.000.000	Usaha/Kegiatan
2	11	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang sesuai dengan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	23.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	10.000.000	

2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		100%	37.000.000			100%	25.000.000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin		100%	37.000.000	Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan		100%	25.000.000	Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	10.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Dokumen	10.000.000	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Badan Usaha	27.000.000			35 Badan Usaha	15.000.000	

2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	100%	10.000.000			100%	10.000.000	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		100%	10.000.000	Masyarakat		100%	10.000.000	Masyarakat
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10.000.000	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup		100%	37.000.000			100%	32.459.000	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup		100%	37.000.000			100%	32.459.000	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Entitas	37.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Entitas	32.459.000	

2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti		60%	15.000.000			60%	13.730.000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		100%	15.000.000	Masyarakat		100%	13.730.000	Masyarakat
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Pengaduan	15.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Pengaduan	13.730.000	

2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/D itangani		72,50%	10.257.194.000			72,50%	6.868.737.100	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah		100%	10.257.194.000			100%	6.868.737.100	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kelompok	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kelompok	0	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	4.442.252.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	100.000.000	
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana Kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan Sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.021,25 Ton	3.000.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.021,25 Ton	3.926.444.600	
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88%	10.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88%	5.250.000	

2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9260,03 Ton	1.779.942.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9260,03 Ton	1.972.187.300	
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Laporan	10.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 laporan	4.740.000	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.500 Ton	975.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.500 Ton	840.115.200	
						Jumlah Pagu			17.458.637.425				13.579.139.000	

BAB IV

PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. **Pengelolaan sampah** : Selain mengelola sampah, DLH juga harus fokus pada pengurangan sampah di sumbernya (misalnya, melalui konsep 3R: reduce, reuse, recycle), serta pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat.
2. **Pengelolaan limbah B3** : Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memerlukan pengawasan ketat, termasuk inventarisasi dan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri dan fasilitas kesehatan
3. **Pengendalian pencemaran**: Terus memantau dan mengendalikan pencemaran udara, air, dan tanah. Ini termasuk penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan
4. **Pemantauan kualitas lingkungan**: Melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap kualitas lingkungan (air, udara, dan tanah) serta evaluasi hasil pemantauan.
5. **Pemeliharaan lingkungan**: Melaksanakan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup, seperti penghijauan dan reboisasi.
6. **Edukasi dan sosialisasi**: Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye lingkungan
7. **Kemitraan**: Membangun kemitraan dengan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi untuk memperkuat upaya pengelolaan lingkungan hidup
8. **Pelayanan publik**: Meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait perizinan lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

4.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk pencapaian visi dan misi tersebut di atas sangat ditentukan oleh faktor keberhasilan sebagai berikut :

1. Kerjasama yang baik oleh sumber daya manusia, lingkungan, baik petugas pelayanan publik, masyarakat dan pelaku usaha
2. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, terutama di tingkat lapangan
3. Kesigapan tenaga teknis di bidang lingkungan hidup untuk menangkal dampak kerusakan lingkungan hidup
4. Tersedianya sarana pendukung dan ala-alat kantor yang memadai

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2027 merupakan acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan :

1. Seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengimplementasikan Renja ini dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Keberhasilan sektor lingkungan hidup harus didukung oleh sektor-sektor lain yang terkait dan didukung oleh pendanaan yang memadai.
3. Rencana kerja ini merupakan langkah awal dalam peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Perlu didasari bahwa keberhasilan di bidang lingkungan hidup tergantung dari partisipasi seluruh masyarakat. Oleh karena itu dalam implementasi renja ini diharapkan partisipasi yang lebih aktif dan luas dari seluruh masyarakat.
5. Setiap kegiatan yang dilaksanakan difokuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam OPD, sebagai sasaran program pada akhir tahun perlu dilakukan evaluasi dan analisis tentang apa yang telah dicapai maupun yang belum tercapai sebagai bahan untuk menyusun program berikutnya.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 19 Juli 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip 19810611 200003 1 002

